



# POLA KONSUMSI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PROVINSI BALI 2012



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BALI**



**POLA KONSUMSI DAN DISTRIBUSI  
PENDAPATAN PROVINSI BALI 2012**

**No. Publikasi** : 51520.1305  
**Katalog BPS** : 3206001.51  
**Ukuran Buku** : 21 cm x 28 cm  
**Jumlah Halaman** : 63 Lembar

**Naskah:**

Bidang Statistik Sosial

**Penyunting:**

Bidang Statistik Sosial

**Gambar Kulit:**

Bidang Statistik Sosial

**Diterbitkan oleh:**

BPS Provinsi Bali

**Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya**

Editor:

Indra Susilo, DP.Sc,MM.

Penulis:

Mulyani Puji Lestari

Pengolah Data:

Mulyani Puji Lestari

## **KATA PENGANTAR**

Publikasi “Pola Konsumsi dan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali 2012”, memuat beberapa indikator terkait dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Beberapa hal dibahas dalam publikasi ini meliputi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, pola konsumsi, dan distribusi pendapatan penduduk Provinsi Bali. Ketiga indikator tersebut secara umum mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Bali.

Diharapkan dari publikasi “Pola Konsumsi dan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali 2012” ini, dapat dijadikan sebagai alat monitoring dan evaluasi bagi pelaksanaan pembangunan, serta sebagai pedoman bagi perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Disadari bahwa dalam publikasi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu saran perbaikan sangat diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya.

Denpasar, Nopember 2012  
**Badan Pusat Statistik Provinsi Bali**  
**K e p a l a,**

**Ir. I Gde Suarsa, M.Si.**  
NIP. 19550628 197903 1 002

## DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Lampiran.....	vii
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penulisan .....	3
1.3. Sistematika Penulisan .....	4
Bab II. METODOLOGI	5
2.1. Rancangan Sampel .....	5
2.2. Teknik Pengumpulan Data .....	7
2.3. Pengolahan Data .....	8
2.4. Konsep dan Definisi .....	8
2.5. Metode Analisis .....	10
2.5.1. Gini Ratio .....	10
2.5.2. Kriteria Bank Dunia.....	11
2.5.3. Kurva Lorenz.....	12
Bab III. PENGELUARAN PER KAPITA DAN POLA KONSUMSI PENDUDUK	14
3.1. Pengeluaran Per Kapita Penduduk 2009 - 2011	14
3.2. Pola Konsumsi Penduduk .....	21
3.2.1. Konsumsi Makanan .....	28
3.2.2. Konsumsi Non Makanan .....	35
Bab IV. DISTRIBUSI PENDAPATAN	41
4.1. Distribusi Pendapatan Provinsi Bali .....	42
4.2. Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota .....	47
Bab V. KESIMPULAN .....	52
LAMPIRAN .....	53

## DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 3.1. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali 2010 – 2012.....	17
Tabel 3.2. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan, Provinsi Bali 2012.....	19
Tabel 3.3 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Jenis Pengeluaran dan Daerah Tempat Tinggal, Provinsi Bali Tahun 2010 - 2012 .....	23
Tabel 3.4. Rata-rata Konsumsi Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok dan Jenis Pengeluaran, Provinsi Bali 2012	27
Tabel 3.5. Proporsi Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Non Makanan dan Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali Tahun 2012 .....	30
Tabel 3.6. Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Makanan dan Kelompok Pengeluaran, Provinsi Bali 2012 .....	32
Tabel 3.7. Proporsi Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Non Makanan dan Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali Tahun 2012 .....	37
Tabel 3.8. Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Non Makanan dan Kelompok Pengeluaran, Provinsi Bali 2012 .....	39
Tabel 4.1. Gini Ratio Menurut Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali Tahun 2012 .....	43
Tabel 4.2. Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota dan Kriteria Bank Dunia, Provinsi Bali Tahun 2006 dan 2011 .....	44
Tabel 4.3. Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2010 - 2012 .....	48
Tabel 4.4 Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota dan Kriteria Bank Dunia, Provinsi Bali Tahun 2006 dan 2011 .....	49

## DAFTAR GAMBAR

		Hdl.
Gambar 3.1.	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2012.....	17
Gambar 3.2.	Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan, Provinsi Bali Tahun 2012 .....	25
Gambar 3.3.	Proporsi Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Makanan, Provinsi Bali 2011 .....	29
Gambar 3.4.	Proporsi Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Non Makanan, Provinsi Bali 2011 .....	36
Gambar 4.1.	Distribusi Pendapatan Menurut Klasifikasi Daerah dan Kriteria Bank Dunia, Provinsi Bali 2011 .....	38
Gambar 4.2.	Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali 2012...	51

<http://bali.bps.go.id>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

	<b>Hal.</b>
Tabel A.1. Rata-Rata Konsumsi Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengeluaran, Provinsi Bali 2010 .....	46
Tabel A.2. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Jembrana 2010 .....	47
Tabel A.3. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Tabanan 2010 .....	48
Tabel A.4. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Badung 2010 .....	49
Tabel A.5. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Gianyar 2010 .....	50
Tabel A.6. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Klungkung 2010 .....	51
Tabel A.7. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Bangli 2010 .....	52
Tabel A.8. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Karangasem 2010 .....	53
Tabel A.9. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Buleleng 2010 .....	54
Tabel A.10. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kota Denpasar Tahun 2010 .....	55

# Pendahuluan

---

## 1.1 Latar Belakang

Setiap negara di dunia memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat melalui peningkatan pembangunan ekonominya. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain pembangunan ekonomi adalah upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pembangunan ekonomi dalam jangka panjang bertujuan untuk mencapai peningkatan pendapatan perkapita, kesempatan kerja yang luas, mengurangi perbedaan perkembangan pembangunan dan kemakmuran antar daerah serta merubah struktur perekonomian supaya tidak berat sebelah. Pembangunan pada hakikatnya tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi juga memberikan penekanan kepada aspek peningkatan tingkat pendapatan masyarakat dan aspek pemerataan.

Sementara, tingkat pendapatan masyarakat dapat tercermin dari tingkat pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita ini secara langsung akan mencerminkan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu, yang selanjutnya akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan baik makanan ataupun non makanan. Semakin tinggi pendapatan per kapita penduduk suatu daerah, tentu diharapkan semakin baiknya tingkat kesejahteraan penduduk di daerah tersebut.

Pola pengeluaran dapat juga dipakai sebagai proksi dari pendapatan yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk dan perubahan komposisinya sebagai indikasi perubahan tingkat kesejahteraan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan pengeluaran/konsumsi masyarakat untuk menghitung pendapatan per kapita penduduk. Hal ini didasarkan pada paradigma bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh pengeluaran konsumsi yang semakin tinggi pula. Sebab bukanlah hal yang mudah untuk mengumpulkan data mengenai jumlah pendapatan yang diterima oleh penduduk. Umumnya masyarakat masih enggan untuk memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan yang mereka terima.

Mengukur tingkat kesejahteraan penduduk hanya dari sisi tingkat pendapatan per kapita, tidaklah cukup. Tingginya tingkat pendapatan penduduk suatu daerah, tidak secara langsung mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan penduduk dari seluruh daerah tersebut. Pada kenyataannya, pendapatan antara individu yang satu dengan individu lainnya tidaklah selalu seragam. Bahkan terdapat ketimpangan yang cukup mencolok antara penduduk yang kaya dengan yang miskin. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan ekonomi antar penduduk adalah dengan menghitung distribusi pendapatan.

Penghitungan distribusi pendapatan yang dilakukan oleh BPS, didasarkan pada data pengeluaran/konsumsi masyarakat yang dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). BPS menggunakan tiga metode untuk mengetahui distribusi pendapatan penduduk yaitu: Koefisien *Gini Ratio*, Kriteria Bank Dunia, dan Kurva Lorenz.

Ketiga indikator tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar perencanaan bagi pembangunan di masa-masa mendatang, sehingga secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk Provinsi Bali pada khususnya dan penduduk Indonesia pada umumnya. Di samping itu, ketiga indikator tersebut dapat menjadi alat kontrol dan evaluasi terhadap proses pembangunan yang telah berjalan selama ini.

Proses pengumpulan data memang tidaklah mudah, bahkan bisa dikatakan data itu mahal, namun akan jauh menjadi lebih mahal jika proses pembangunan dilakukan tanpa data. Mengingat pentingnya indikator-indikator tersebut bagi peningkatan kualitas penduduk selaku obyek pembangunan, maka selaku subyek, penduduk diharapkan senantiasa berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan. Salah satunya adalah memberikan informasi yang benar ketika menjadi responden dari sensus atau survei yang diselenggarakan oleh BPS.

## 1.2 Tujuan Penulisan

Penyusunan publikasi ini, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan data dan informasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan para konsumen data, mengenai indikator tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Bali Tahun 2012.

Secara khusus, tujuan dari penyusunan publikasi ini antara lain:

- Mengetahui pola konsumsi penduduk Provinsi Bali,
- Mengetahui distribusi pendapatan penduduk Provinsi Bali,
- Mengetahui ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali.

### 1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi “Pola Konsumsi dan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali 2012” ini, disajikan secara sistematis dalam empat bab sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN

Terdiri atas sub bab latar belakang, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

- BAB II. METODOLOGI

Terdiri atas sub bab rancangan sampel, teknik pengumpulan data, pengolahan data, konsep dan definisi, serta metode analisis.

- BAB III. PENGELUARAN PER KAPITA DAN POLA KONSUMSI PENDUDUK

Terdiri atas sub bab pengeluaran per kapita penduduk dan pola konsumsi penduduk.

- BAB IV. DISTRIBUSI PENDAPATAN

Terdiri atas sub bab distribusi pendapatan Provinsi Bali dan distribusi pendapatan menurut kabupaten/kota.

- BAB V. KESIMPULAN

## Metodologi

---

### 2.1. Rancangan Sampel

Data sosial ekonomi sangat dibutuhkan untuk mengetahui gambaran proses dan pencapaian hasil pembangunan sebagai bahan umpan balik bagi para ahli dan pengambil kebijakan pembangunan. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) digunakan sebagai bahan analisis dalam publikasi “Pola Konsumsi dan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali 2012”. Pendataan Susenas 2012 dilaksanakan secara triwulanan yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data yang dihasilkan dan sejalan dengan peningkatan frekuensi permintaan data.

Susenas 2012 dilaksanakan di seluruh wilayah geografis Indonesia dengan ukuran sampel sebesar 300.000 rumah tangga terbagi dalam daerah perkotaan maupun perdesaan. Sementara itu, untuk Provinsi Bali sendiri, sampelnya tersebar pada sembilan kabupaten/kota mencakup seluruh kecamatan baik wilayah perkotaan maupun perdesaan dengan jumlah sampel sebesar 5.760 rumah tangga, dalam 576 blok sensus di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Kerangka sampel yang digunakan dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012 terdiri dari tiga jenis, yaitu kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap pertama, kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap kedua dan kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap ketiga.

Kerangka sampel pemilihan tahap pertama adalah daftar wilayah pencacahan (wilcah) SP2010 yang disertai dengan informasi banyaknya rumah tangga hasil listing SP2010 (Daftar RBL1), muatan blok sensus dominan (pemukiman biasa, pemukiman mewah, pemukiman kumuh), informasi daerah sulit/tidak sulit dan klasifikasi desa/kelurahan. Kerangka sampel pemilihan tahap kedua adalah daftar blok sensus pada setiap wilcah terpilih. Kerangka sampel pemilihan tahap ketiga adalah daftar rumah tangga biasa tidak termasuk *institutional household* (panti asuhan, barak, polisi/militer, penjara dsb) dalam setiap blok sensus sampel hasil pencacahan lengkap SP2010 (SP2010-C1) yang telah dimutakhirkan pada setiap menjelang pelaksanaan survei.

Metode sampling yang digunakan yaitu penarikan sampel tahap berstrata. Tahapan dari metode ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, memilih  $n_h$  (*number of hypothesis sample*) wilcah dari  $N_h$  (*number of hypothesis population*) secara PPS (*Probability Proportional to Size*). Kemudian wilcah tersebut dialokasikan secara acak ke dalam empat triwulanan.
- b. Tahap kedua, memilih BS pada setiap wilcah terpilih secara pps dengan size jumlah rumah tangga SP2010-RBL1.
- c. Tahap ketiga, dari setiap blok sensus terpilih untuk Susenas dipilih sejumlah rumah tangga biasa ( $n=10$ ) secara sistematis berdasarkan hasil pemutakhiran listing rumah tangga SP2010-C1 dengan menggunakan Daftar VSEN11-P. Daftar nama kepala rumah tangga disusun dari Ekstrak SP2010-C1 untuk

variable nama KRT, alamat, dan tingkat pendidikan KRT, kemudian dilakukan pemutakhiran di lapangan.

## 2.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan, maka pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan langsung terhadap kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang dianggap mengetahui keadaan rumah tangga bersangkutan.

Referensi waktu survei yang digunakan adalah selama seminggu yang lalu untuk konsumsi makanan, dan sebulan atau setahun yang lalu untuk konsumsi bukan makanan.

Data pokok yang dipergunakan dalam penghitungan dan analisis distribusi pendapatan adalah pengeluaran rumah tangga, bukan pendapatan rumah tangga. Jadi data pendapatan rumah tangga dihitung dengan menggunakan pendekatan data pengeluaran rumah tangga. Hal ini dilakukan mengingat pengumpulan data pendapatan rumah tangga sangat sulit dikumpulkan oleh petugas lapangan.

Masalah pendapatan rumah tangga biasanya dirahasiakan oleh responden sehingga data pendapatan yang diperoleh cenderung *under estimate*. Berbeda halnya jika responden ditanyakan mengenai pengeluaran rumah tangga, informasi yang diperoleh cukup mendekati kebenaran. Oleh karena itu, acuan analisis yang digunakan dalam publikasi ini didasarkan pada data pengeluaran rumah tangga penduduk.

### 2.3. Pengolahan Data

Pada dasarnya pengolahan data dilakukan melalui dua proses, yaitu proses manual dan proses komputer. Proses manual meliputi kegiatan pengecekan awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan (*editing*) terhadap isian yang tidak wajar termasuk hubungan keterkaitan (konsistensi) antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lain, serta proses pemberian kode-kode (*coding*). Proses komputer meliputi perekaman data (*data entry*), tabulasi, pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner dan proses komputer lanjutan seperti tabulasi.

### 2.4. Konsep dan Definisi

Blok Sensus (BS) adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang membagi habis suatu desa/kelurahan tersebut dan merupakan daerah kerja dari seorang pencacah. Blok sensus mempunyai batas-batas yang jelas dan mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan yang diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka waktu sepuluh tahun. Pada umumnya BS mencakup sekitar 80 - 120 rumah tangga atau bangunan fisik bukan tempat tinggal atau dapat juga merupakan gabungan dari keduanya.

Klasifikasi Daerah adalah karakteristik yang membedakan lokasi daerah menurut indikator komposit yang telah ditetapkan, klasifikasi daerah dibedakan menjadi dua yaitu daerah perkotaan dan perdesaan.

Pengeluaran/konsumsi rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan non makanan.

Konsumsi makanan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan makanan termasuk makanan jadi, rokok dan tembakau.

Konsumsi non makanan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, aneka barang dan jasa, pakaian, dan barang tahan lama tanpa memperhatikan asal barang.

Distribusi pendapatan adalah banyaknya pendapatan yang diterima oleh masing-masing rumah tangga/penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Dalam penelitian ini distribusi pendapatan diukur dari nilai konsumsi rumah tangga/penduduk.

Pola konsumsi adalah kecenderungan rumah tangga/penduduk membelanjakan pendapatannya dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga/penduduk tersebut baik konsumsi makanan maupun bukan makanan.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah seluruh biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga sebulan oleh semua anggota rumah tangga di bagi jumlah anggota rumah tangga.

Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk konsumsi bukan makanan sebulan dan setahun yang lalu. Konsumsi makanan dan non makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

## 2.5. Metode Analisis

Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan. Dalam publikasi ini distribusi pendapatan diukur dari nilai konsumsi rumah tangga penduduk, sedangkan untuk mengukur pemerataan pendapatan digunakan metode *Gini Ratio*, Ukuran Bank Dunia dan Kurva Lorenz. Ketiga metode ini dipakai mengingat bahwa keduanya telah banyak digunakan di berbagai negara maupun daerah lain di Indonesia, sehingga hasil penghitungan ini bisa dibandingkan dengan penghitungan di daerah lain dan atau dengan negara lain.

### 2.5.1. *Gini Ratio*

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah *Gini Ratio*. Nilai *gini ratio* berkisar antara nol dan satu. Bila *gini ratio* sama dengan nol berarti distribusi pendapatan amat merata sekali karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Namun bila *gini ratio* sama dengan satu menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja. Singkatnya, semakin tinggi nilai *gini ratio* maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu daerah. Sebaliknya, semakin rendah nilai *gini ratio* berarti semakin merata distribusi pendapatannya.

Harry T. Oshima memberikan batasan mengenai Koefisien Gini sebagai berikut:

- Bila koefisien Gini terletak antara 0,5 dan 1 maka ketimpangan pembagian pendapatan dikatakan tinggi.
- Bila koefisien Gini terletak antara 0,35 dan 0,5 maka ketimpangan pembagian pendapatan dikatakan sedang.
- Bila koefisien Gini terletak dibawah 0,35 maka ketimpangan pembagian pendapatan dikatakan rendah.

Rumus untuk menghitung *gini ratio* adalah sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

dimana :

G = *Gini ratio*

P<sub>i</sub> = Persentase rumah tangga/penduduk pada kelompok pendapatan ke-(i)

Q<sub>i</sub> = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke-(i)

Q<sub>i-1</sub> = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke-(i-1)

K = Banyaknya kelompok pendapatan.

## 2.5.2 Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia membagi penduduk menurut kelompok pendapatan menjadi tiga kelompok pendapatan yaitu: pertama; 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kedua; 40 persen penduduk berpendapatan menengah, ketiga; 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

Bank Dunia dalam melihat pemerataan pendapatan memfokuskan perhatiannya pada perkembangan pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan terendah saja. Pemerataan diukur berdasarkan persentase pendapatan yang diterima 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

- a) Apabila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima kurang dari 12 persen jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan rendah atau ketimpangan distribusi pendapatan tinggi.
- b) Apabila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima antara 12 persen sampai 17 persen jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan sedang atau ketimpangan distribusi pendapatan sedang.
- c) Apabila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan tinggi atau ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

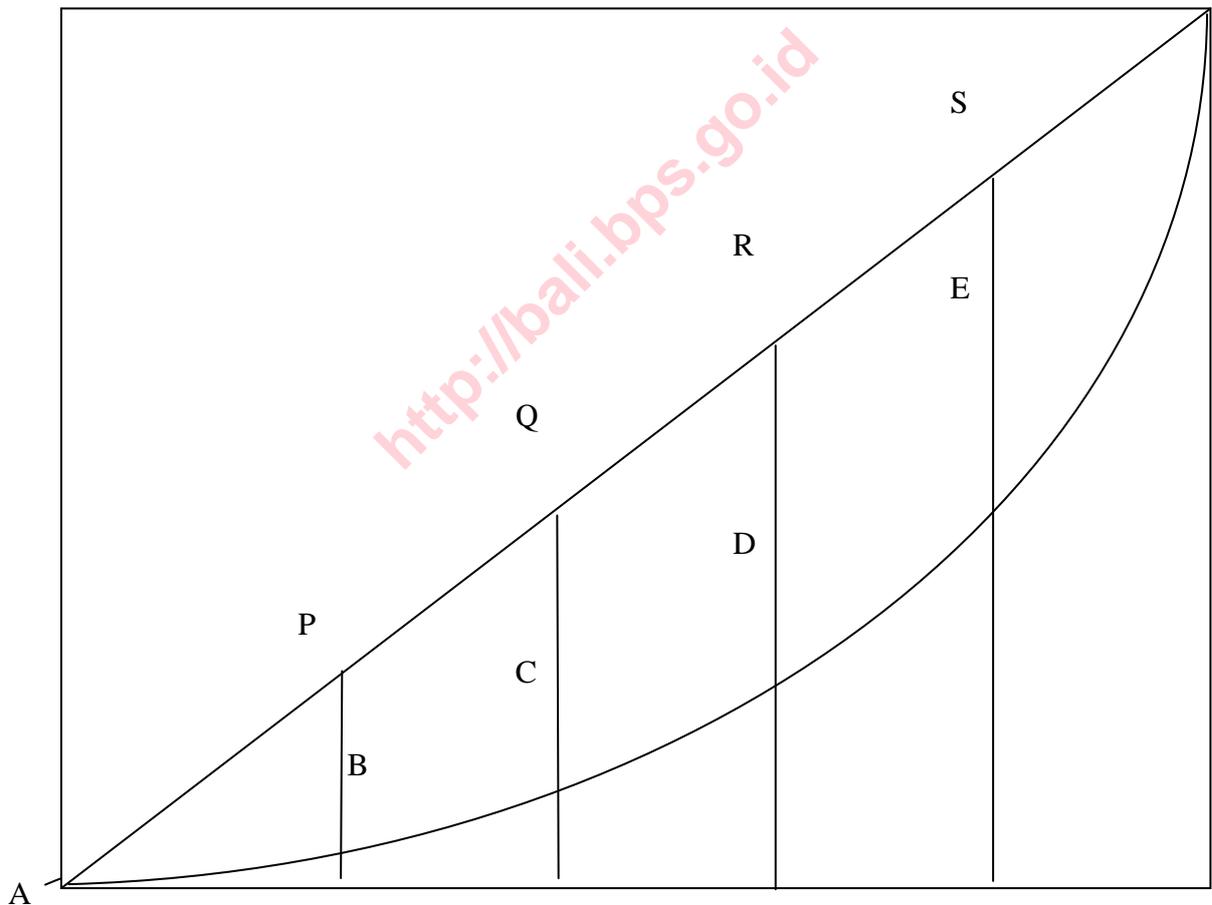
### 2.5.3 Kurva Lorenz

Ukuran koefisien Gini biasanya divisualisasikan dalam bentuk kurva Lorenz. Pada kurva Lorenz diperlihatkan hubungan antara penduduk sebagai penerima pendapatan dan jumlah pendapatan yang diterima. Kurva Lorenz digambarkan pada satu segi empat sama sisi, dimana sumbu horizontal menunjukkan persentase jumlah penduduk sedangkan sumbu vertikal menunjukkan persentase jumlah pendapatan yang diterima.

Dalam keadaan distribusi pendapatan yang merata sempurna, maka a % dari jumlah penduduk akan menerima a % dari jumlah pendapatan. Sehingga dalam kurva

Lorenz keadaan ini digambarkan sebagai garis diagonal dari bawah kiri ke atas kanan (koefisien Gini = 0). Sebaliknya jika a % jumlah penduduk menerima kurang dari a % jumlah pendapatan, maka Kurva Lorenz akan menyimpang dari garis diagonal. Karena Kurva Lorenz disusun dengan menggunakan persentase kumulatif (dari yang terendah ke yang tertinggi), maka penyimpangan Kurva Lorenz tersebut terhadap garis diagonal memberat ke bawah (cembung).

**Gambar Kurva Lorenz**



## Pengeluaran Per Kapita dan Pola Konsumsi Penduduk

---

### 3.1 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk

Metode penghitungan pengeluaran sebagai pendekatan dari pendapatan merupakan suatu hal yang umum dilakukan meskipun sebenarnya hal ini tidak seluruhnya tepat, mengingat bahwa keinginan manusia akan barang dan jasa relatif tidak terbatas, sebab manusia tidak pernah merasa puas atas apa yang telah diperoleh sedangkan pendapatan untuk membiayai pemuasan keinginan tersebut relatif terbatas. Kondisi sebaliknya justru terjadi pada penduduk berpenghasilan tinggi, pola pengeluaran pada golongan ini cenderung mengalami titik jenuh sementara tidak demikian halnya dengan pendapatan yang mereka peroleh, potensi untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi lagi sangat mungkin mereka dapatkan. Meskipun terkesan bias namun untuk memperoleh data pendapatan sangatlah sulit sehingga akan lebih mudah jika pendekatannya dengan menghitung besaran pengeluaran.

Besarnya pengeluaran penduduk dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk yaitu dengan mengetahui kemampuan daya belinya. Artinya jika terjadi peningkatan kemampuan daya beli pada masyarakat maka akan meningkatkan pula kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Semakin tinggi tingkat pendapatan akan memberikan keleluasaan bagi penduduk untuk melakukan proses konsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, penduduk dengan tingkat pendapatan yang kecil, kegiatan konsumsinya pun akan lebih terbatas lagi.

Perkembangan pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dikaji bahwa selama periode 2010 – 2012, pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010, pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali adalah sebesar Rp. 601.222. Meningkat Rp 159.234 atau sekitar 26,48 persen di tahun 2011 menjadi Rp 760,456. Sementara rata-rata pengeluaran perkapita perbulan penduduk di tahun 2012 adalah Rp 911,724 meningkat sebesar Rp. 151,568 atau 19,89 persen dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa jika harga-harga tidak banyak berubah, kenaikan pengeluaran perkapita tersebut jelas menunjukkan adanya peningkatan daya beli penduduk. Peningkatan kemampuan tersebut memberi arti bahwa penduduk dari tahun ke tahun memiliki lebih banyak keleluasaan dalam menentukan pilihan untuk membelanjakan pendapatannya untuk pemenuhan kebutuhan ke arah yang lebih baik.

**Tabel 3.1. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali Tahun 2010–2012**

Klasifikasi daerah	2010	% pertumbuhan	2011	% pertumbuhan	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	714.882	25,62	898.037	19,56	1.073.654
Perdesaan	429.183	28,76	552.624	20,20	664.265
Bali	601.222	26,49	760.456	19,89	911.724

Sumber : Susenas 2012

Pada Tabel 3.1 diperlihatkan juga mengenai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali yang dibedakan menurut daerah tempat tinggalnya yaitu perdesaan dan perkotaan. Di daerah perkotaan selama periode 2010 – 2012, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk selalu lebih besar dibandingkan di daerah

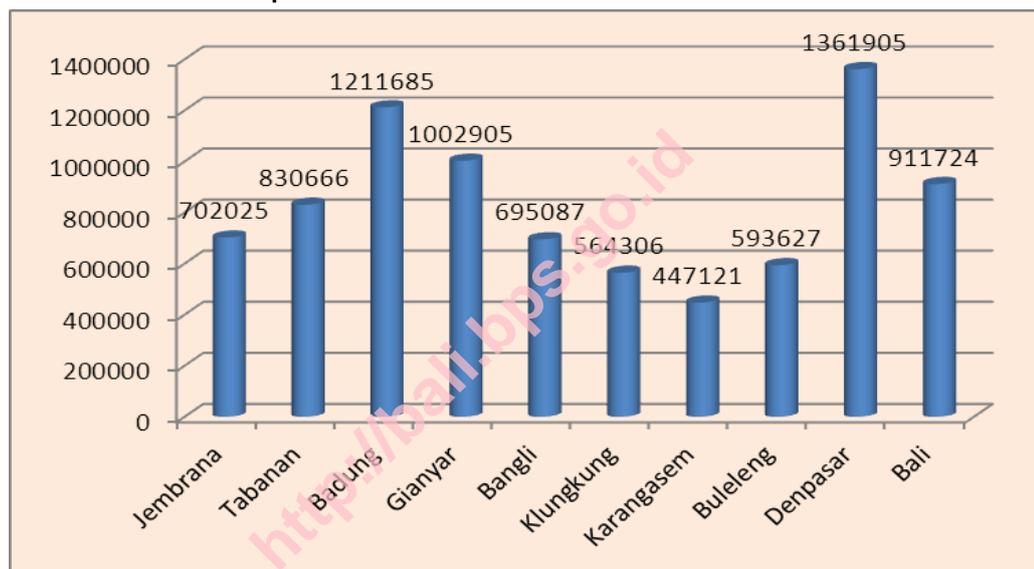
perdesaan. Kondisi ini terkait dengan lebih kompleksnya pengeluaran penduduk di daerah perkotaan dibandingkan penduduk di daerah perdesaan.

Hal lain yang ditunjukkan pada gambar diatas adalah bahwa kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali di daerah perkotaan periode 2010 – 2012 secara absolut juga selalu lebih tinggi dari perdesaan. Di perkotaan terjadi kenaikan sebesar Rp 183.155 dari Rp 714.882 di tahun 2010 menjadi Rp 898.037 tahun 2011 dan terus meningkat sebesar Rp 175.617 di tahun 2012 menjadi 1.037.654, sementara di perdesaan berturut-turut kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan penduduknya adalah sebagai berikut: meningkat Rp 123.441 (tahun 2011) dan Rp 111.641 (tahun 2012).

Namun jika dilihat dari nilai persentasenya ternyata kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan penduduk perdesaan justru lebih tinggi dari perkotaan. Di perdesaan pada tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 28,76 persen sedangkan di perkotaan hanya meningkat sebesar 25,62 persen atau lebih rendah 3,14 poin. Begitu juga di tahun 2012, di perdesaan persentase kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan penduduknya adalah 20,20 persen, sementara di perkotaan kenaikannya hanya 19,89 persen. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pertumbuhan daya beli penduduk perdesaan lebih tinggi dari pada perkotaan, terlebih untuk produk hasil pertanian sedangkan untuk produk-produk industri sendiri belum bisa dipastikan mengingat adanya faktor harga yang lebih tinggi di perdesaan akibat adanya biaya tambahan yaitu transportasi. Akan tetapi harus juga dipahami bahwa nilai absolut sebagai dasar perhitungan kenaikan persentase tersebut berbeda sehingga untuk daerah perdesaan meskipun kenaikan persentasenya tinggi, tetap harus diperhitungkan bahwa nilai awal pembagiannya lebih rendah dari perkotaan.

Tinggi rendahnya rata-rata pengeluaran perkapita perbulan selain menjadi tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan penduduk daerah satu dengan daerah lainnya. Pada Gambar 3.1 berikut disajikan gambaran mengenai rata-rata pengeluaran perkapita perbulan penduduk di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.

**Gambar 3.1. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2012**



Sumber: Susenas 2012

Pada Gambar 3.1 terlihat bahwa perbedaan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kota Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang tertinggi di antara kabupaten lainnya yaitu mencapai Rp 1.361.905. Sementara daerah lain dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan lebih tinggi dari angka Bali adalah Kabupaten Badung (Rp 1.211.685) dan Gianyar (Rp 1.002.905). Tingginya nilai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di tiga wilayah tersebut menunjukkan bahwa

kemakmuran serta kesejahteraan penduduknya lebih baik dibanding wilayah lain di Provinsi Bali pada umumnya.

Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan nilai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah se-Bali yaitu Rp 447.121. Seperti diketahui bersama bahwa Kabupaten Karangasem adalah kabupaten termiskin sehingga kemampuan daya beli masyarakatnya pun rendah. Daerah yang memiliki nilai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Bali lainnya yaitu Tabanan (Rp 830.666), Jembrana (Rp 702.025), Bangli (Rp 695087), Buleleng (Rp 593.627) dan Klungkung (Rp 564.306).

Perbandingan secara regional mengenai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali juga dapat dikaji berdasarkan persentase jumlah penduduk pada masing-masing kelompok pengeluaran, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Seiring dengan meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita penduduk, ternyata terjadi pergeseran persentase penduduk ke kelompok rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang lebih tinggi.

**Tabel 3.2. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota dan Kelompok Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan, Provinsi Bali 2012**

Kab/Kota	Kelompok Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rupiah/bulan)					
	100.000 s/d 149.999	150.000 s/d 199.999	200.000 s/d 299.999	300.000 s/d 399.999	400.000 s/d 499.999	>= 500.000
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jembrana	0,00	1,44	13,22	19,07	15,10	51,18
Tabanan	0,00	0,00	6,30	13,45	15,15	65,10
Badung	0,00	0,00	1,02	5,23	6,10	87,65
Gianyar	0,00	0,08	1,98	8,08	11,32	78,54
Klungkung	0,00	2,12	10,78	17,93	16,76	52,41
Bangli	0,00	1,62	16,36	23,98	17,37	40,67
Karangasem	0,87	2,61	29,57	27,83	12,74	26,39
Buleleng	0,00	1,66	16,61	25,52	13,58	42,63
Denpasar	0,00	0,00	1,13	6,66	7,62	84,60
<b>Bali</b>	0,09	0,81	9,10	14,69	11,52	63,80
<b>2011</b>	0,14	1,62	13,45	16,87	12,06	55,86

Sumber : Susenas 2012

Perbandingan persentase kelompok rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah terjadinya penurunan di hampir semua kelompok pengeluaran, kecuali pada kelompok pengeluaran Rp 500.000 ke atas yang justru mengalami kenaikan. Terdapat sekitar 63,80 persen penduduk yang pengeluaran konsumsinya diatas Rp 500.000 atau lebih tinggi sekitar 7,94 poin dibanding tahun

sebelumnya. Penurunan tertinggi adalah pada kelompok pengeluaran antara Rp 200.000 s/d 299.999 yaitu sebanyak 4,35 poin dari 13,45 persen di tahun 2011 menjadi 9,10 di tahun berikutnya. Perubahan atau pergeseran persentase kelompok pengeluaran penduduk dari kelompok rendah ke kelompok tinggi ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan seiring dengan meningkatnya kemampuan daya beli penduduk. Bisa dikatakan bahwa kondisi ini dapat menjadi indikator awal dari keberhasilan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.

Perubahan persentase kelompok pengeluaran juga terjadi di hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa kelompok pengeluaran Rp 500.000 ke atas mendominasi besaran persentase penduduk di sebagian besar wilayah. Kabupaten Badung menduduki urutan pertama dimana 87,65 persen penduduknya telah membelanjakan pendapatannya di atas Rp 500.000, diikuti oleh Kota Denpasar yaitu sebanyak 84,60 persen. Daerah lain dengan persentase kelompok pengeluaran di atas Rp 500.00 yang lebih tinggi dari persentase Bali adalah Gianyar (78,54 persen) dan Tabanan (65,10 persen). Tak heran jika keempat wilayah ini memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibanding wilayah lain karena wilayah tersebut merupakan pusat sentra pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali yang lebih dikenal dengan sebutan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan).

Wilayah dengan kelompok pengeluaran di atas Rp 500.00 yang persentasenya lebih dari 50 persen namun lebih rendah dari Bali adalah Kabupaten Klungkung (52,41 persen) dan Jembrana (51,18 persen). Meskipun dari segi kondisi ekonomi kedua daerah tersebut tidak lebih baik dari Sarbagita namun masih tergolong bagus dibanding wilayah Kabupaten Buleleng (42,63 persen), Bangli (40,67 persen) dan Karangasem (26,39 persen). Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah

daerah dalam menjalankan roda pembangunannya untuk lebih memprioritaskan wilayah-wilayah tersebut demi mencapai kemakmuran secara menyeluruh.

Wilayah yang perlu mendapat perhatian serius adalah Kabupaten Karangasem. Dari data yang disajikan, terlihat bahwa masih ada penduduk yang pengeluarannya berada pada kelompok terendah atau kelompok Rp 100.000 – 149.999 yaitu sebesar 0,87 persen. Sementara persentase tertinggi penduduknya sebanyak 29,57 persen berada pada kelompok pengeluaran menengah atau antara Rp 200.000 – 299.999. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Kabupaten Karangasem merupakan wilayah termiskin di Bali, oleh karena itu perlu adanya perhatian serius dari pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan program pengentasan kemiskinannya di wilayah tersebut.

### **3.2 Pola Konsumsi Penduduk**

Pengaruh pendapatan terhadap konsumsi mempunyai hubungan yang erat, penghasilan seseorang merupakan faktor utama yang menentukan pola konsumsinya. Sementara, pola konsumsi masyarakat ditentukan oleh tingkat pendapatan, semakin tinggi pendapatan masyarakat maka semakin baik pula pola konsumsinya, hal ini dikarenakan meningkatnya kemampuan daya beli mereka. Yang dimaksud dengan pola konsumsi adalah kecenderungan rumah tangga atau penduduk membelanjakan pendapatannya dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga/penduduk tersebut, baik konsumsi makanan maupun non makanan.

Pola pengeluaran konsumsi penduduk dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan, semakin rendah

persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

Selain itu, dari data pengeluaran (sebagai proksi data pendapatan) dapat pula dihitung tingkat ketimpangan pendapatan penduduk suatu wilayah. Data Susenas membedakan pengeluaran menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi non makanan sebulan dan setahun terakhir. Baik pengeluaran konsumsi makanan maupun non makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

Tingkat pemenuhan kebutuhan dua jenis pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, kebutuhan makanan lebih didahulukan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk non makanan.

Pergeseran komposisi dan pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan secara umum rendah, sedangkan elastisitas permintaan terhadap kebutuhan non makanan relatif lebih tinggi. Artinya perubahan harga yang terjadi pada kelompok makanan, tidak akan terlalu mempengaruhi tingkat permintaan penduduk terhadap makanan. Berapapun harga makanan, penduduk senantiasa berusaha untuk membelinya. Berbeda halnya ketika perubahan harga terjadi pada kelompok non makanan.

**Tabel 3.3. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2010 – 2012**

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Pengeluaran					
	Makanan			Non Makanan		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan (Rp)	316049	347181	397319	398833	550856	676334
(%)	44,21	38,66	37,01	55,79	61,34	62,99
Perdesaan (Rp)	229570	274544	317976	199613	278080	346289
(%)	53,49	49,68	47,87	46,51	50,32	52,13
Bali (Rp)	281673	318251	365936	319549	442205	545788
(%)	46,85	41,85	40,14	53,15	58,15	59,86

Sumber: Susenas 2011 - 2012

Pada Tabel 3.3 disajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut jenis pengeluaran dan daerah tempat tinggal periode tahun 2010 – 2012. Berdasarkan hasil proyeksi, penduduk Bali tahun 2012 sebesar 4.105 ribu jiwa dan berdasar hasil olah Susenas 2012 pengeluaran rata-rata perkapita sebulan penduduk Bali adalah sebesar Rp 911.724,- rupiah. Sebesar Rp 365.936,- rupiah atau 40,14 persen dari pengeluaran digunakan untuk kebutuhan makanan dan sisanya sebesar Rp 545.788,- rupiah atau 59,86 persen digunakan untuk kebutuhan non makanan.

Terlihat bahwa selama periode tahun 2010 hingga 2012 telah terjadi pergeseran pola konsumsi penduduk Bali yaitu menurunnya pengeluaran untuk konsumsi makanan dan makin meningkatnya pengeluaran untuk konsumsi non makanan baik besaran absolut maupun persentasenya. Secara umum persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan mengalami penurunan dari 46,85 persen di tahun 2010 menjadi 41,85 persen pada tahun 2011 dan semakin menurun di tahun 2012 yaitu menjadi 40,14 persen. Sementara untuk konsumsi non makanan justru mengalami kenaikan tiap tahunnya, dari

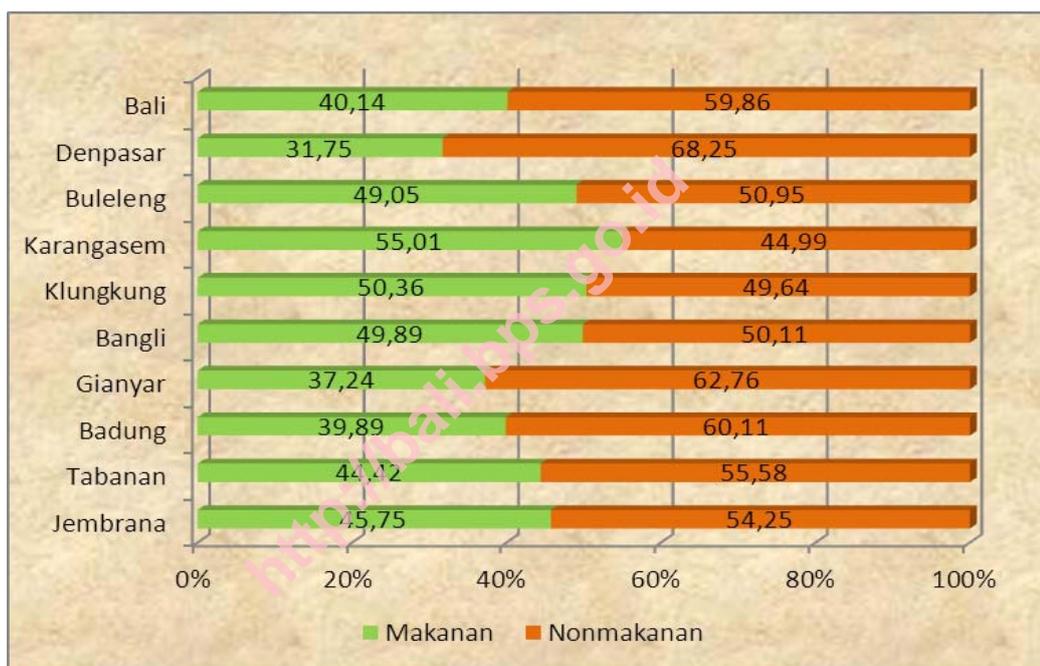
53,15 persen di tahun 2010 menjadi 58,15 persen di tahun 2011 dan terus meningkat menjadi 59,86 persen di tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi penduduk Bali semakin membaik seiring meningkatnya besaran pengeluaran dan pergeseran pola konsumsi penduduk menuju kelompok konsumsi non makanan.

Pergeseran pola konsumsi masyarakat dari konsumsi makanan ke konsumsi non makanan juga terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan tiap tahunnya. Untuk daerah perkotaan tercatat bahwa dari tahun 2010 sampai tahun 2011 pola konsumsi makanan terus menurun persentasenya, dari 44,21 atau sebesar Rp 316.409,- rupiah di tahun 2010 menjadi 38,66 persen atau sebesar Rp 347.181,- rupiah di tahun 2011 dan terus menurun 1,65 poin di tahun 2012 yaitu menjadi 37,01 persen. Hal ini bertolak belakang dengan persentase konsumsi non makanannya yang justru menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Dari Tabel 3.3 terlihat bahwa di tahun 2010 persentase pengeluaran untuk konsumsi non makanan sebesar 55,79 persen atau sebesar Rp 398.833,- rupiah sedangkan di tahun 2011 meningkat 5,55 poin menjadi 61,34 persen, begitu juga di tahun 2012 mengalami peningkatan hingga mencapai 62,99 persen atau sebesar Rp 676.334,- rupiah.

Kondisi yang sama pun terjadi di daerah perdesaan, yaitu berlakunya pergeseran pola konsumsi masyarakat dari konsumsi makanan ke konsumsi non makanan meskipun jika dilihat dari besaran absolut maupun persentasenya menunjukkan angka lebih tinggi dari perkotaan untuk konsumsi makanan dan angka lebih rendah untuk konsumsi non makanannya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa baik penduduk perkotaan maupun perdesaan cenderung sudah beralih ke kebutuhan sekunder/tersier (bukan makanan). Namun jika dilihat dari proporsinya maka tingkat kesejahteraan penduduk daerah perkotaan lebih baik jika dibandingkan dengan perdesaan.

Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota masih terdapat variasi komposisi pengeluaran untuk makanan dan non makanan yang cukup tinggi. Dari Gambar 3.2 berikut dapat dilihat bahwa secara regional, belum semua kabupaten/kota di Provinsi Bali pola konsumsi penduduknya telah terkonsentrasi pada kelompok non makanan.

**Gambar 3.2. Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan, Provinsi Bali 2012**



Sumber: Susenas 2012

Masih terdapat dua kabupaten yang persentase pengeluaran untuk makanannya di atas 50 persen yaitu Kabupaten Klungkung dan Karangasem. Hal ini diduga karena kondisi topografi wilayah maupun perkembangan ekonomi di kedua wilayah tersebut cenderung lebih lambat dibanding daerah lainnya. Proporsi konsumsi makanan dan non makanan di Kabupaten Klungkung berturut-turut adalah 50,46 dan 49,64 persen. Sementara Kabupaten Karangasem 55,01 persen pengeluaran digunakan untuk konsumsi makanan dan 44,99 persen untuk non makanan. Kabupaten Bangli dan

Buleleng merupakan wilayah dengan persentase kelompok makanan tertinggi berikutnya.

Sementara 3 kabupaten/kota lainnya proporsi untuk pengeluaran makanannya berada pada kisaran 31-41 persen yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung memiliki porsi pengeluaran terkecil untuk konsumsi makanannya masing-masing sebesar 31,75 persen; 37,24 persen dan 39,89 persen, lebih rendah rata-rata pengeluaran makanan untuk Provinsi Bali yang hanya 40,14 persen. Tak heran jika ketiga wilayah ini memiliki persentase pengeluaran non makanan lebih besar dari wilayah lain, sebab ketiga wilayah tersebut merupakan penggerak kegiatan ekonomi di Bali terutama Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga wilayah ini memiliki tingkat kesejahteraan penduduk yang lebih baik dari wilayah lainnya.

Pergeseran pola konsumsi penduduk akan jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, dimana kenaikan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan ataupun untuk investasi dan ditabung. Menurut Hukum Engel (Ernest Engel, 1857), "Bila selera tidak berubah maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan". Dengan ukuran yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, berdasarkan rata-rata pendapatannya, penduduk di suatu daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Mengacu pada Hukum Engel, berarti pengeluaran untuk makanan pada kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah akan lebih besar dibandingkan

pengeluaran untuk non makanan, dan berlaku sebaliknya untuk kelompok pendapatan yang lebih tinggi.

Proporsi pengeluaran makanan dan non makanan penduduk Provinsi Bali berdasar kelompok pengeluarannya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.4. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok dan Jenis Pengeluaran, Provinsi Bali 2012**

Kelompok Pengeluaran Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total
	Nominal	%	Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40% penduduk berpengeluaran rendah	218.288	59,05	151.396	40,95	369.685
40% penduduk berpengeluaran menengah	390.089	47,97	423.055	52,03	813.144
20% penduduk berpengeluaran tinggi	612.599	27,95	1.578.805	72,05	2.191.404
<b>Total</b>	365.936	40,14	545.788	59,86	911.724
<b>2011</b>	318.230	41,85	442.226	58,15	760.456

Sumber : Susenas 2012

Pada Tabel 3.4 terlihat bahwa komposisi pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan sedangkan pengeluaran untuk non makanan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk. Pada kelompok penduduk 40% berpengeluaran rendah lebih dari 50 persen pendapatannya digunakan untuk konsumsi makanan. Persentase ini kemudian menurun di kelompok 40% penduduk berpengeluaran menengah. Kondisi mendekati titik jenuh dialami kelompok 20% penduduk berpengeluaran tinggi, bahwa hampir 75 persen pendapatannya digunakan

untuk konsumsi non makanan atau hanya sekitar 27,95 persen pengeluarannya digunakan untuk konsumsi makanan. Dapat dikatakan bahwa persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan mengalami penurunan pada kelompok penduduk yang berpengeluaran menengah dan tinggi. Sebaliknya pengeluaran non makanan mengalami peningkatan untuk kelompok penduduk yang berpengeluaran menengah dan tinggi.

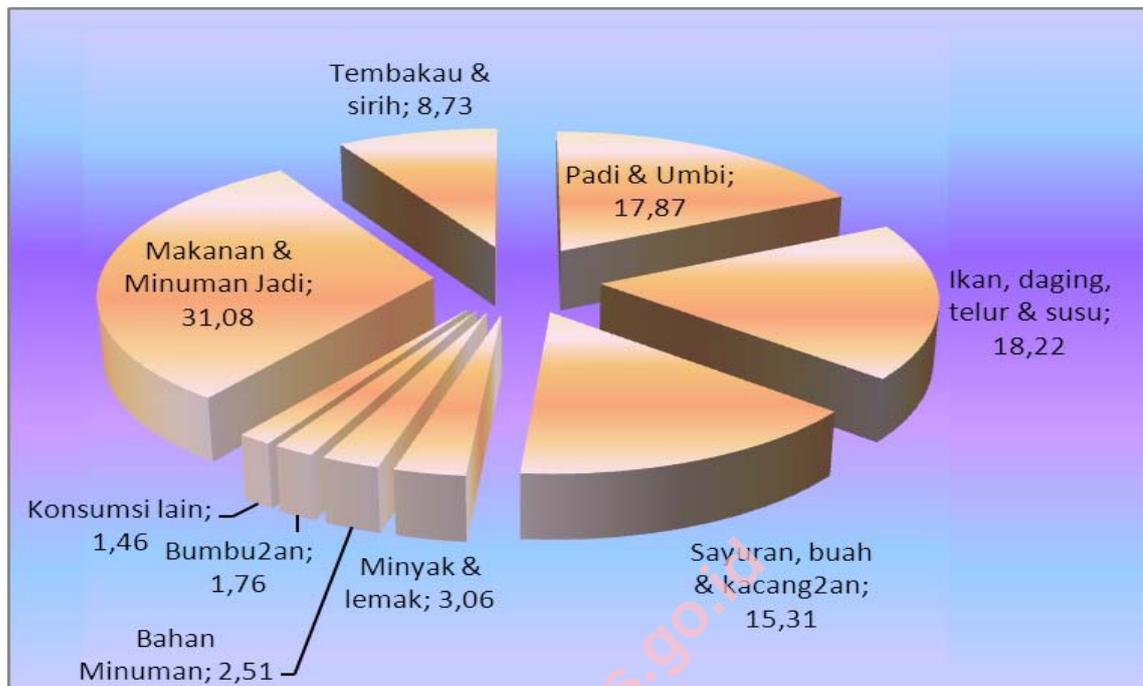
### 3.2.1 Konsumsi Makanan

Makanan memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga manusia akan melakukan berbagai upaya untuk dapat mengkonsumsi makanan yang memadai. Konsumsi makanan akan bertambah seiring dengan peningkatan pendapatan. Namun sampai pada titik jenuh tertentu, penambahan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi non makanan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya elastisitas permintaan terhadap makanan.

Pengeluaran untuk kelompok makanan meliputi pengeluaran untuk konsumsi padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makan dan minuman jadi serta tembakau dan sirih.

Makanan yang dikonsumsi tersebut adalah makanan yang betul-betul dikonsumsi baik berasal dari produksi sendiri, pembelian maupun pemberian. Pengeluaran untuk makanan dihitung menggunakan consumption approach artinya yang dihitung sebagai pengeluaran adalah yang sudah benar-benar dikonsumsi selama masa referensi. Dalam hal ini, referensi waktu yang BPS gunakan adalah jangka waktu seminggu yang lalu.

**Gambar 3.3. Proporsi Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Makanan, Provinsi Bali 2012**



Sumber : Susenas 2012

Pengeluaran untuk makanan diklasifikasikan menjadi sembilan kelompok seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.3. Terlihat bahwa porsi pengeluaran untuk konsumsi makanan dan minuman jadi masih menempati proporsi tertinggi dalam pengeluaran untuk makanan yaitu sebesar 33,38 persen, sedangkan untuk proporsi tertinggi berikutnya adalah konsumsi padi dan umbi-umbian yaitu 17,84 persen. Meskipun mengalami penurunan, tapi konsumsi komoditi jenis ini cenderung masih tinggi, sehingga ke depan kebutuhan terhadap beras pun masih akan besar

Kelompok komoditi berikutnya yang banyak menghabiskan pendapatan masyarakat adalah kelompok sumber protein (ikan, daging, telur & susu) yaitu 16,50 persen. Sementara itu kelompok sayuran, buah dan kacang-kacangan memiliki proporsi sebesar 14,98 persen.

Jenis konsumsi makanan yang dikonsumsi penduduk dengan persentase lebih rendah dari 2 persen berturut-turut adalah bumbu-bumbuan (1,69 persen) dan konsumsi lain (1,44 persen).

**Tabel 3.5. Proporsi Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Makanan dan Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali 2012**

Jenis Komoditi	Perkotaan	Perdesaan	Bali
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-padian	14,63	22,64	17,38
Umbi-umbian	0,34	0,78	0,49
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	4,90	4,72	4,84
Daging	7,53	7,96	7,68
Telur dan Susu	6,39	4,42	5,71
Sayur-sayuran	6,69	7,71	7,04
Kacang-kacangan	2,22	2,32	2,25
Buah-buahan	5,71	6,58	6,01
Minyak dan Lemak	2,87	3,40	3,06
Bahan Minuman	1,94	3,60	2,51
Bumbu-bumbuan	1,71	1,85	1,76
Konsumsi Lainnya	1,52	1,36	1,46
Makanan dan Minuman Jadi	35,00	23,60	31,08
Tembakau dan Sirih	8,55	9,06	8,73
<b>Jumlah</b>	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2012

Tabel 3.5 berikut menggambarkan proporsi pengeluaran per kapita untuk kelompok makanan yang dibedakan menurut klasifikasi daerah baik perkotaan maupun

perdesaan. Perbedaan gaya hidup antara penduduk di daerah perkotaan dan perdesaan, mengakibatkan perbedaan pola konsumsi makanan yang cukup signifikan di antara penduduk di kedua daerah tersebut.

Pada daerah perkotaan, proporsi terbesar konsumsi makanan adalah untuk konsumsi makanan dan minuman jadi yang mencapai 35,00 persen. Kepraktisan dan kemudahan mengkonsumsi kelompok tersebut lebih menjadi pertimbangan utama penduduk perkotaan membelanjakan pengeluarannya, disamping karena kesibukan dan terbatasnya waktu penduduk perkotaan. Kelompok pengeluaran tertinggi berikutnya untuk daerah perkotaan adalah kelompok padi-padian yaitu sebesar 14,63 persen dan 8,55 persen untuk kelompok tembakau dan sirih.

Satu hal yang cukup menarik terjadi di daerah perdesaan pada tahun 2012 adalah bahwa telah terdapat pergeseran proporsi pengeluaran dari kelompok padi-padian menjadi konsumsi makanan dan minuman jadi yang mencapai 23,60 persen, melebihi konsumsi kelompok padi-padian yaitu sebesar 22,64 persen. Pengaruh makin maraknya produk-produk instan di masyarakat menjadi salah satu penyebab pergeseran pola konsumsi ini. Kecenderungan untuk bersikap lebih efisien dan praktis itulah yang mempengaruhi masyarakat umum untuk beralih mengkonsumsi jenis makanan dan minuman jadi.

Dari segi budaya, pergeseran ini dikhawatirkan menjadi pertanda bahwa masyarakat semakin menyukai hal-hal yang bersifat instan dan praktis. Selain itu, dari segi keamanan pangan, ada beberapa isu yang harus menjadi perhatian. Makanan jadi banyak digemari karena kepraktisannya. Teknologi pangan yang berkembang pesat telah memudahkan konsumen untuk menyantap beragam produk pangan kapan pun dengan cita rasa yang bervariasi.

Sementara itu, kelompok konsumsi tembakau dan sirih di perdesaan mencapai 9,06 persen sedikit lebih tinggi dibanding perkotaan. Begitupun juga untuk kelompok konsumsi sayur –sayuran dan buah-buahan, proporsi pengeluaran di perdesaan melebihi konsumsi di perkotaan yaitu sebesar 7,71 dan 6,58 persen. Tingginya persentase konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan di perdesaan, diduga karena kemudahan penduduk perdesaan untuk memperoleh kedua jenis konsumsi makanan tersebut, selain harga yang lebih rendah tentunya.

Pada Tabel 3.6 berikut disajikan mengenai persentase rata-rata pengeluaran konsumsi makanan dilihat menurut kelompok total pengeluaran. Sama seperti tahun sebelumnya bahwa kelompok pengeluaran terendah di tahun 2012 berada pada kelompok Rp. 100.000 – Rp. 149.999 per kapita per bulan, kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2009 dimana masih terdapat penduduk yang berada pada kelompok pengeluaran konsumsi makanan di bawah Rp 99.000 rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat, dengan kata lain bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Bali semakin membaik dari tahun ke tahun.

**Tabel 3.6. Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Makanan dan Kelompok Pengeluaran, Provinsi Bali 2012**

Jenis Komoditi	Kelompok Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rupiah/bulan)						Total
	100.000 s/d 149.999	150.000 s/d 199.999	200.000 s/d 299.999	300.000 s/d 399.999	400.000 s/d 499.999	> = 500.000	
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Padi - padian	39.63	42.48	33.99	26.99	22.75	14.84	17.38
Umbi - umbian	9.01	1.02	1.01	0.63	0.55	0.44	0.49
Ikan/udang/ Cumi/kerang	1.06	4.61	5.85	5.84	5.16	4.64	4.84
Daging	0.00	2.60	3.14	4.98	6.89	8.31	7.68
Telur & susu	1.30	2.27	3.11	3.94	4.60	6.17	5.71
Sayur - sayuran	13.24	11.14	9.74	9.28	8.41	6.51	7.04
Kacang - kacang	2.25	3.06	2.86	2.94	2.59	2.11	2.25
Buah - buahan	5.21	1.07	3.61	4.39	5.82	6.34	6.01
Minyak dan Lemak	5.37	4.51	4.37	4.37	3.93	2.75	3.06
Bahan Minuman	7.75	4.61	3.72	3.12	3.13	2.31	2.51
Bumbu - bumbu	2.27	2.43	2.01	2.20	2.05	1.67	1.76
Konsumsi Lainnya	2.78	1.57	1.41	1.52	1.60	1.44	1.46
Mkn dan Minumn Jadi	7.70	14.15	18.37	21.53	24.13	33.56	31.08
Tembakau dan sirih	2.43	4.48	6.79	8.26	8.40	8.93	8.73
<b>Jumlah</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2012

Menurut beberapa literatur dan tren data yang ada, terdapat indikasi bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk yang ditandai dengan semakin besarnya total pengeluaran, maka proporsi pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi padi-padian akan semakin kecil atau bisa dikatakan bahwa konsumsi penduduk pada kelompok padi-padian akan mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya kelompok pengeluaran. Namun tidak demikian halnya dengan kondisi di tahun 2012, konsumsi padi-padian justru mengalami peningkatan pada kelompok pengeluaran Rp 150.000 – 199.999, yaitu sebesar 42,48 persen atau lebih tinggi 2,85 poin dari kelompok pengeluaran dibawahnya. Persentase ini kembali menurun pada kelompok pengeluaran berikutnya yaitu di kelompok Rp. 200.000 – Rp. 299.999 yang sebesar 33,99 persen dan terus menurun sampai kelompok pengeluaran > 500.000.

Pengeluaran konsumsi jenis protein (daging, telur&susu) meningkat secara signifikan sejalan dengan meningkatnya kelompok pengeluaran. Hal ini menyangkut kemampuan daya beli penduduk untuk membeli jenis komoditi tersebut mengingat harga sebagai pertimbangannya selain faktor gizi sebagai penunjang kesehatan badan. Keadaan yang sama pun terjadi pada komoditi jenis makanan dan minuman jadi, pada kelompok pengeluaran terendah persentase pengeluarannya sebesar 7,70 persen digunakan untuk mengkonsumsi komoditi jenis tersebut meningkat hingga pada kelompok pengeluaran teratas yaitu 33,56 persen. Faktor kepraktisan dan waktu yang terbataslah yang diduga menjadi prioritas untuk mengkonsumsi jenis komoditi ini.

Kondisi sama namun cukup membuat ironis adalah meningkatnya persentase pengeluaran jenis tembakau dan sirih seiring dengan tingginya kelompok pengeluaran. Pada kelompok pengeluaran terendah, persentase konsumsinya sebesar 2,43 persen sedangkan kelompok tertinggi adalah 8,93 persen yang digunakan untuk konsumsi jenis

tembakau dan sirih. Kiranya pertimbangan kesehatan tidak begitu diindahkan dalam hal ini, padahal semestinya semakin tinggi kelompok pengeluaran penduduk maka rasa kepedulian akan pentingnya kesehatan semakin tinggi pula terlepas dari faktor sosial, budaya dan pendidikannya.

### 3.2.2. Konsumsi Non Makanan

Penghitungan pengeluaran non makanan dihitung menggunakan delivery approach artinya bahwa yang dihitung sebagai konsumsi/pengeluaran adalah barang-barang yang sudah dibeli (meskipun belum lunas)/diperoleh/digunakan oleh anggota rumah tangga selama masa referensi (sebulan yang lalu dan setahun yang lalu). Pengeluaran non makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang tahan lama, pajak, pungutan dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara/kenduri. Secara garis besar, konsumsi non makanan di bagi menjadi delapan sub kelompok yaitu sub kelompok perumahan (terdiri dari pengeluaran untuk sewa, kontrak, imputasi sewa rumah; pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan ringan; pengeluaran listrik dan pengeluaran telepon), sub kelompok aneka barang dan jasa (terdiri dari sub kelompok sabun dan kosmetik, biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya transportasi dan jasa lainnya), sub kelompok pakaian, sub kelompok barang tahan lama, sub kelompok pajak, pungutan & asuransi serta terakhir adalah sub kelompok pesta.

Pada dasarnya kebutuhan non makanan menjadi prioritas kedua bagi individu dalam pemenuhan kebutuhannya, artinya bahwa pengeluaran untuk konsumsi non makanan baru akan dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan konsumsi makanan. Di tahun 2012, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali untuk

kelompok non makanan mencapai Rp. 545.788 rupiah, meningkat sebesar Rp. 103.562 rupiah atau sekitar 23,42 persen dibanding tahun 2011.

**Gambar 3.4. Proporsi Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Non Makanan, Provinsi Bali 2012**



Sumber : Susenas 2012

Pengeluaran untuk perumahan, sama seperti tahun – tahun sebelumnya masih menempati persentase tertinggi yaitu mencapai 40,00 persen, kondisi ini menggambarkan bahwa biaya pengeluaran untuk properti di Provinsi Bali memang cukup tinggi. Bisa di lihat pada Gambar 3.4. Pengeluaran tertinggi berikutnya adalah kelompok aneka barang dan jasa yaitu sebesar 26,88 persen. Biaya transportasi baik untuk sekedar pembelian bahan bakar, perbaikan dan perawatan serta sewa kendaraanlah yang memberi sumbangan tertinggi pada kelompok jenis pengeluaran ini. Konsumsi pesta dan upacara menempati urutan tertinggi berikutnya yaitu 13,86 persen. Tingginya persentase pada pengeluaran jenis ini tak heran sebab mayoritas penduduk Bali adalah menganut agama Hindu dimana upacara dan ritual keagamaan sangat kental dalam pelaksanaan menjalankan ibadahnya. Sementara kelompok non makanan

yang menempati proporsi terendah adalah pengeluaran untuk kelompok pakaian yaitu sebesar 3,13 persen.

**Tabel 3.7. Proporsi Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Non Makanan dan Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali 2012**

Jenis Pengeluaran	Perkotaan	Perdesaan	Bali
(1)	(2)	(3)	(4)
Sewa, kontrak, imputasi sewa rumah	28,43	22,47	26,94
Pemeliharaan dan perbaikan ringan	0,63	0,92	0,70
Listrik	6,00	10,82	7,21
Telepon	5,30	4,70	5,15
Sabun dan kosmetik	3,84	4,57	4,03
Biaya kesehatan	4,77	7,87	5,55
Biaya pendidikan	6,04	5,21	5,83
Biaya transportasi	8,75	11,53	9,44
Jasa lainnya	2,51	0,58	2,03
Pakaian dan alas kaki	2,79	4,14	3,13
Barang tahan lama	10,42	11,78	10,76
Pajak	1,39	2,12	1,57
Pungutan dan retribusi	0,59	1,51	0,82
Asuransi Kesehatan	1,50	0,62	1,28
Asuransi lainnya	2,11	0,48	1,70
Pesta dan upacara	14,93	10,66	13,86
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Susenas 2012

Proporsi pengeluaran non makanan di daerah perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Tabel 3.7 di atas. Pengeluaran untuk sewa, kontrak dan imputasi sewa rumah memiliki proporsi terbesar, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan, pengeluaran untuk sewa, kontrak dan imputasi sewa rumah mencapai 28,43 persen sedangkan di daerah perdesaan mencapai 22,47 persen. Begitupun juga dengan pengeluaran untuk pesta dan upacara, persentase di perkotaan lebih tinggi 4,27 poin dari perdesaan yaitu sebesar 14,93 persen untuk perkotaan dan 10,66 persen untuk perdesaan. Kedua jenis pengeluaran ini tak lain lebih disebabkan oleh faktor harga yang berbeda, harga sewa/imputasi sewa rumah maupun perlengkapan keperluan pesta dan upacara di kota lebih tinggi dari daerah perdesaan sementara permintaan untuk kedua jenis kebutuhan tersebut juga lebih tinggi di perkotaan dibanding perdesaan.

Satu hal yang menarik adalah pada jenis pengeluaran listrik, untuk daerah perkotaan menunjukkan angka 6,00 persen sedangkan di daerah perdesaan justru lebih tinggi yaitu mencapai 10,82 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa di daerah perkotaan kesadaran untuk melakukan penghematan terhadap penggunaan alat-alat listrik sudah dilaksanakan dibanding di daerah perdesaan.

**Tabel 3.8. Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Sub Kelompok Non Makanan dan Kelompok Pengeluaran, Provinsi Bali 2012**

Jenis Komoditi	Kelompok Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rupiah/bulan)						Total
	100.000 s/d 149.999	150.000 s/d 199.999	200.000 s/d 299.999	300.000 s/d 399.999	400.000 s/d 499.999	> = 500.000	
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Sewa, kontrak, imputasi sewa rmh	21.04	27.84	24.90	26.09	29.09	26.91	26.94
Pemeliharaan dan perbaikan ringan	0.00	0.00	0.07	0.46	0.19	0.74	0.70
Listrik	39.20	25.94	20.70	16.50	14.30	6.26	7.21
Telepon	2.12	3.72	4.68	6.14	6.14	5.08	5.15
Sabun dan kosmetik	10.68	8.99	8.06	6.91	5.97	3.75	4.03
Biaya kesehatan	3.82	4.71	3.96	4.57	4.51	5.66	5.55
Biaya pendidikan	1.60	5.51	6.98	6.72	5.93	5.77	5.83
Biaya transportasi	6.24	6.39	10.49	11.38	11.98	9.24	9.44
Jasa lainnya	3.87	0.28	0.24	0.94	0.75	2.16	2.03
Pakaian dan alas kaki	2.90	3.97	4.20	4.14	3.89	3.03	3.13
Barang tahan lama	0.00	1.01	1.59	2.02	2.75	11.64	10.76
Pajak	0.70	1.16	1.64	1.71	1.96	1.55	1.57
Pungutan dan retribusi	0.16	0.81	1.66	1.53	1.50	0.75	0.82
Asuransi Kesehatan	0.00	1.48	0.18	0.88	0.55	3.22	2.98
Pesta	7.67	8.18	10.66	10.02	10.47	14.23	13.86
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Susenas 2012

Dalam Tabel 3.8 yang menjelaskan mengenai persentase rata-rata pengeluaran menurut kelompok pengeluarannya terlihat bahwa pola konsumsi non makanan untuk masing-masing kelompok pengeluaran cukup bervariasi. Pengeluaran untuk jenis komoditi sewa, kontrak, imputasi rumah hampir selalu menempati persentase tertinggi di setiap kelompok pengeluaran. Seperti terlihat pada tabel di atas, persentase pada kelompok terendah adalah sebesar 21,04 persen sedangkan pada kelompok tertinggi memiliki persentase sebesar 26,91 persen. Tingginya persentase pengeluaran pada kelompok jenis ini disebabkan oleh karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk sewa, kontrak atau imputasi rumah milik sendiri.

Ada beberapa jenis komoditi yang meningkat secara signifikan seiring tingginya kelompok pengeluaran diantaranya yaitu biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya transportasi, telepon dan pengeluaran untuk keperluan pesta. Hal ini terkait dengan gaya hidup dan kebutuhan tersier yang meningkat di kelompok pengeluaran tinggi. Sementara itu ada beberapa jenis komoditi pengeluaran yang menurun seiring dengan tingginya kelompok pengeluaran yaitu sabun kosmetik dan listrik, dan kondisi ini mengindikasikan bahwa di kelompok pengeluaran tinggi usaha untuk melakukan hemat energi semakin meningkat.

## Distribusi Pendapatan

---

Setelah membahas tren rata-rata pengeluaran per kapita penduduk berikut pola konsumsinya, selanjutnya informasi yang dapat dikembangkan dari data pengeluaran adalah bagaimana pola distribusi pendapatan tersebut bisa menggambarkan kondisi ketimpangan yang terjadi. Sebab pembangunan yang sedang berjalan bukanlah merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi berkurangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti dari pembangunan. Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat.

Selama pertumbuhan ekonomi dan hasil-hasil dari pembangunan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, maka masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan tidak akan muncul. Jika kinerja ekonominya lebih baik atau mengalami kemajuan maka seluruh rakyat juga harus merasakan dampak kemajuan tersebut dalam bentuk naiknya pendapatan. Dengan kata lain, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Peningkatan kualitas hidup penduduk menjadi sasaran akhir dari pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan bidang-bidang pembangunan lainnya. Salah satu bidang pembangunan yang cukup berperan bagi peningkatan kualitas hidup penduduk adalah pembangunan di bidang ekonomi. Keberhasilan Provinsi Bali di bidang perekonomian salah satunya

tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil pada kisaran antara 5 – 6 persen selama lima tahun terakhir. Tercatat pada triwulan tiga tahun 2012, ekonomi di Bali tumbuh sebesar 6,79 persen yang didorong oleh seluruh sektor ekonomi yang ada, dengan persentase terbesar penyokongnya adalah konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 58,65 persen.

Pertumbuhan ekonomi tersebut juga membawa akibat pada menurunnya tingkat pengangguran. Pada Agustus 2012, tingkat pengangguran hanya 2,04 persen, turun sekitar 0,28 persen dari Agustus tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,32 persen dengan tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 76,97 persen.

Tak dapat dipungkiri bahwa kuantitas penduduk memberi pengaruh besar pada naiknya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun demikian penduduk yang besar lagi berkualitas menjadi harapan bagi proses jalannya pembangunan sebab penduduk dalam hal ini tidak menjadi beban dalam pembangunan.

#### **4.1. Distribusi Pendapatan Provinsi Bali**

Hasil Susenas tahun 2012 menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi di Provinsi Bali sudah tergolong dalam kategori menengah yaitu terletak pada interval 0,35 dan 0,5, atau lebih tepatnya adalah 0,4017. Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa seiring berjalannya waktu, telah terjadi peningkatan indeks gini rasio di Bali. Tercatat bahwa di tahun 2010 indeks gini rasio Bali masih sebesar 0,3195, nilai ini mengalami peningkatan di tahun 2011 yaitu menjadi 0,3821. Selayaknya kondisi ini dapat menjadi perhatian bersama bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi Bali juga dibarengi dengan meningkatnya kesenjangan di masyarakat. Tentunya hal ini tidak seperti yang diharapkan. Sebab pada dasarnya peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah bertujuan

untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya secara menyeluruh di setiap lapisan.

**Tabel 4.1. *Gini Ratio* Menurut Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali 2012**

<b>Klasifikasi Daerah</b>	<b><i>Gini Ratio</i></b>
(1)	(2)
Perkotaan	0,4114
Perdesaan	0,3363
<b>Bali</b>	0,4017
<b>2011</b>	0,3821
<b>2010</b>	0,3195

Sumber : Susenas 2012

Sedangkan jika dibandingkan menurut klasifikasi daerah, kesenjangan pendapatan di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan yaitu sebesar 0,4114 untuk indeks gini rasio perkotaan dan 0,3363 untuk perdesaan. Semakin tinggi tingkat *gini ratio* suatu wilayah mencerminkan bahwa semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan yang terjadi di antara penduduk daerah tersebut.

Lebih tingginya nilai indeks gini rasio di perkotaan lebih disebabkan karena sifat penduduk perkotaan yang lebih majemuk dan beragam baik dari segi jenis pekerjaan, status ekonomi hingga pendapatan yang mereka peroleh. Berfluktuasinya pendapatan penduduk di perkotaan karena terdapat rentang perbedaan yang sangat mencolok antara penduduk yang berpendapatan rendah dengan penduduk berpendapatan tinggi. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di masyarakat perkotaan. Namun untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan secara mendalam dibutuhkan adanya suatu kajian lebih lanjut.

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui persentase pendapatan yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan penduduk. Sejalan dengan nilai *gini ratio*, hasil penghitungan menurut kriteria Bank Dunia juga memperlihatkan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan di Provinsi Bali sudah masuk dalam kategori menengah.

Bank Dunia memfokuskan perhatian pada perkembangan pendapatan yang diperoleh oleh penduduk yang termasuk dalam 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Pada tahun 2011, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah masih menerima lebih dari 17 persen jumlah total pendapatan yaitu sebesar 17,20 persen. Namun di tahun 2012, kondisi ini menjadi terbalik. Kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah sudah menerima kurang dari 17 persen yaitu hanya 16,21 persen. Dapat di simpulkan bahwa hanya dalam kurun waktu satu tahun kondisi berubah dari kategori ketimpangan rendah (pemerataan tinggi) menjadi ketimpangan menengah (pemerataan sedang).

**Tabel 4.2. Distribusi Pendapatan Menurut Klasifikasi Daerah dan Kriteria Bank Dunia, Provinsi Bali 2012**

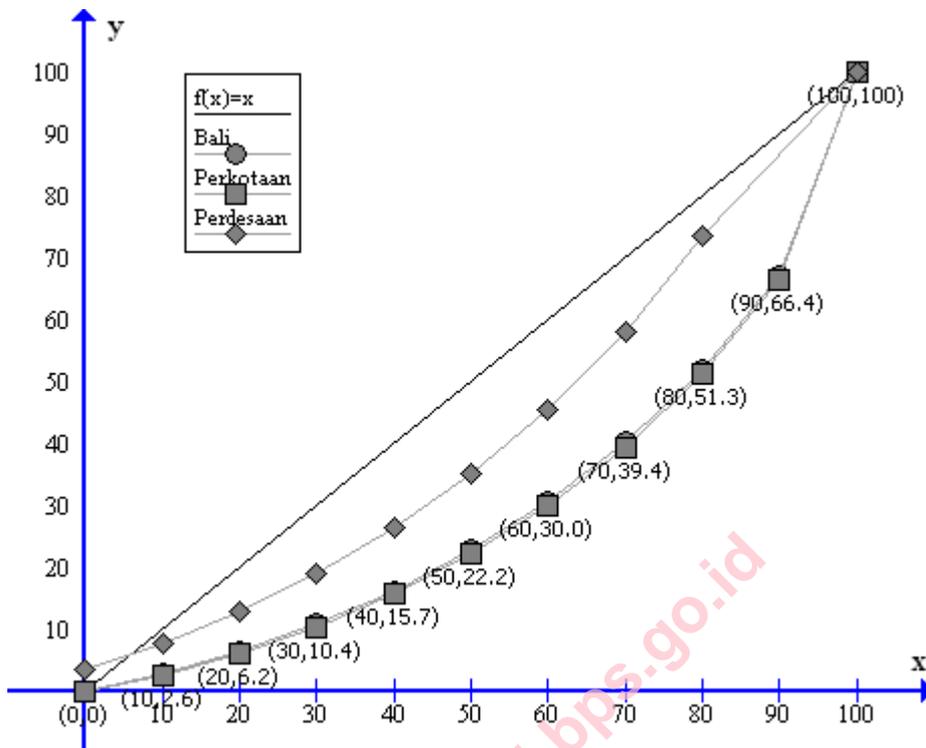
Klasifikasi Daerah	Kelompok Pendapatan		
	40% penduduk berpendapatan rendah	40% penduduk berpendapatan menengah	20% penduduk berpendapatan tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	15,74	35,56	48,70
Perdesaan	19,07	38,99	41,94
<b>Bali</b>	<b>16,21</b>	<b>35,67</b>	<b>48,11</b>
<b>2011</b>	17,20	36,38	46,42

Sumber : Susenas 2012

Berdasarkan Tabel 4.2, pada tahun 2012 tingkat pemerataan pendapatan di daerah pedesaan adalah lebih tinggi dibanding daerah perkotaan atau dengan kata lain bahwa ketimpangan pendapatan di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Hal ini terlihat dari lebih besarnya porsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah di pedesaan dibanding di perkotaan. Jumlah pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah di pedesaan mencapai 19,07 persen (masuk kategori ketimpangan rendah karena diatas 17 persen), jauh lebih tinggi dibanding porsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah di perkotaan yang hanya 15,74 persen (masuk kategori sedang).

Sebagai pendukung dari kedua metode di atas, tingkat kesenjangan ekonomi di Provinsi Bali dapat divisualisasikan melalui Kurva Lorenz seperti terlihat pada Gambar 4.1. Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan suatu wilayah secara kumulatif. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkat yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan wilayah, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurva Lorenz menunjukkan bahwa garis yang mendekati garis diagonal akan dikatakan memiliki karakteristik pembagian pendapatan yang lebih merata.

Gambar 4.1. Distribusi Pendapatan Menurut Klasifikasi Daerah, Provinsi Bali 2012



Sumber: Susenas 2012

Sejalan dengan dua hasil penghitungan sebelumnya, tingkat pemerataan pendapatan di daerah perdesaan memang sudah lebih baik dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini tercermin dari garis distribusi pendapatan daerah perdesaan yang lebih mendekati garis diagonal dibandingkan garis distribusi pendapatan daerah perkotaan.

Menurut beberapa pendapat salah satu yang menyebabkan ketidakmerataan pendapatan adalah mekanisme pasar ekonomi yang ada sekarang ini dimana daerah-daerah yang relatif sudah maju dalam hal ini perkotaan akan semakin cepat pertumbuhannya sementara daerah yang kurang maju (perdesaan) tingkat pertumbuhannya cenderung lebih lambat. Hal inilah yang memicu timbulnya

ketimpangan tersebut, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan jalannya pembangunan yang lebih berimbang di seluruh wilayah.

#### 4.2. Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota

Meskipun secara administratif, wilayah Provinsi Bali terbagi menjadi delapan kabupaten dan satu kotamadya, namun diupayakan pembangunan dapat berjalan dengan merata. Sehingga diharapkan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Untuk mencapai pemerataan tersebut ternyata bukanlah persoalan yang sederhana. Diperlukan strategi-strategi pembangunan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

Pemahaman mengenai tingkat kesenjangan ekonomi di tingkat regional, tentu sangat penting bagi perencanaan pembangunan di masa mendatang. Dengan perencanaan pembangunan yang terarah, tentu diharapkan hasil-hasil pembangunan yang lebih optimal.

Secara umum, *gini ratio* pada tahun 2012 di masing-masing kabupaten/kota lebih rendah dibanding nilai *gini ratio* untuk Provinsi Bali yang mencapai 0,4017 kecuali Kota Denpasar yang memiliki indeks *gini* sebesar 0,4248. Masih tingginya *gini ratio* provinsi menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat perbandingan *gini ratio* di masing-masing kabupaten/kota dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2012. Pergerakan nilai indeks *gini ratio* dari tahun 2010 ke tahun 2011 sangat beragam. Ada beberapa wilayah yang berubah status ketimpangan pendapatannya yaitu dari kategori rendah (dibawah 0,35) menjadi kategori sedang (antara 0,35 – 0,5) diantaranya adalah Kabupaten Jembrana,

Tabanan dan Klungkung yaitu berturut-turut 0,4020; 0,3648; dan 0,3777. Sementara wilayah lainnya tetap.

**Tabel 4.3. Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2010 - 2012**

Kabupaten/Kota	Gini Ratio		
	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	
Jembrana	0,2575	0,4020	0,3706
Tabanan	0,2596	0,3648	0,3473
Badung	0,2864	0,3385	0,3258
Gianyar	0,2717	0,3279	0,3362
Klungkung	0,2857	0,3777	0,3473
Bangli	0,2217	0,2678	0,3053
Karangasem	0,2325	0,2916	0,2877
Buleleng	0,2557	0,3434	0,3330
Denpasar	0,2950	0,3399	0,4248
<b>BALI</b>	<b>0,3195</b>	<b>0,3820</b>	<b>0,4017</b>

Sumber : Susenas 2010 – 2012

Perkembangan nilai indeks gini ratio antara tahun 2011 hingga 2012 pun mengalami hal senada. Kota Denpasar yang awalnya masih dalam kategori ketimpangan rendah, di tahun 2012 berubah status menjadi ketimpangan sedang yaitu dari 0,3399 di tahun 2011 menjadi 0,4248. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa makin beragam dan majemuknya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah dapat memberi pengaruh pada terjadinya ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Kenaikan *gini ratio* yang terjadi di Denpasar menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan di daerah ini, yang berarti bahwa pemerataan hasil pembangunan kurang berhasil. Hal ini dapat

juga disebabkan karena sangat bervariasinya peluang/kesempatan untuk meningkatkan pendapatan, mulai dari kesempatan peningkatan pendapatan yang sangat signifikan maupun kesempatan peningkatan pendapatan yang tidak signifikan, semua lebih banyak terjadi di Denpasar dibandingkan di daerah lain.

Lain halnya dengan Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Klungkung, pada tahun 2011 kedua wilayah ini masuk dalam kategori ketimpangan sedang kemudian di tahun berikutnya berubah menjadi kategori rendah.

**Tabel 4.4. Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota dan Kriteria Bank Dunia, Provinsi Bali Tahun 2010 dan 2012**

Kabupaten/ Kota	Distribusi Pendapatan								
	40 % penduduk berpendapatan rendah			40 % penduduk berpendapatan sedang			20 % penduduk berpendapatan tinggi		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Jembrana	24,12	18,16	18,85	38,98	31,38	33,97	36,90	50,44	47,18
Tabanan	24,41	18,59	19,05	38,15	35,82	37,19	37,44	45,58	43,76
Badung	22,26	19,19	19,75	39,27	38,50	39,17	38,47	42,30	41,08
Gianyar	23,84	20,25	19,59	37,57	37,44	38,10	38,59	42,30	42,32
Klungkung	22,80	17,37	19,07	37,79	37,22	37,49	39,41	45,40	43,44
Bangli	25,83	23,81	21,60	40,57	38,56	37,69	33,60	37,61	40,71
Karangasem	25,24	22,12	23,12	40,29	38,62	36,96	34,47	39,24	39,92
Buleleng	24,23	20,09	20,27	39,01	35,73	36,79	36,77	44,16	42,94
Denpasar	22,10	18,66	16,08	38,29	39,85	33,12	39,61	41,47	50,80
<b>BALI</b>	<b>20,75</b>	<b>17,20</b>	<b>16,21</b>	<b>37,52</b>	<b>36,37</b>	<b>35,67</b>	<b>41,73</b>	<b>46,42</b>	<b>48,11</b>

Sumber : Susenas 2010 - 2012

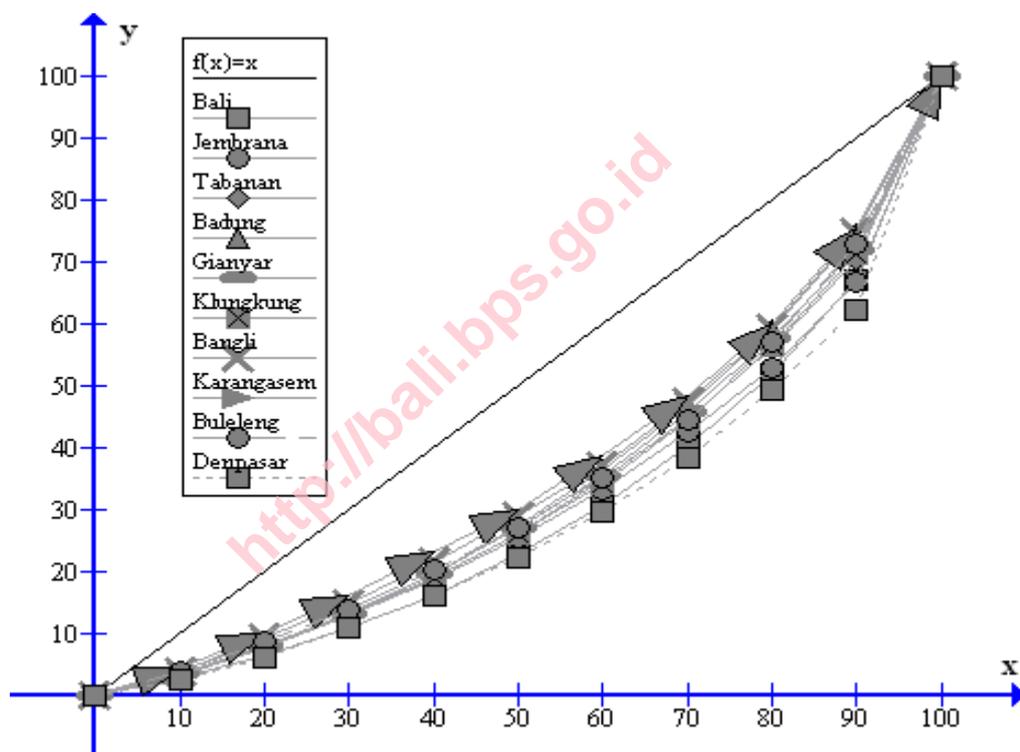
Gambaran mengenai tingkat kesenjangan penduduk di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali berdasarkan kriteria Bank Dunia, dapat dilihat pada Tabel 4.4, dimana 40 persen penduduk berpendapatan rendah di seluruh kabupaten/kota rata-rata sudah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan di daerahnya yang artinya bahwa distribusi pendapatan di wilayah tersebut berada pada kategori ketimpangan rendah.

Meskipun secara rata-rata hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Bali masih dalam kategori ketimpangan rendah, namun kondisi ini tetap harus diwaspadai mengingat nilai persentasenya yang berfluktuasi. Keadaan yang harus dijaga adalah jangan sampai persentase ini terus menurun yang berarti mendekati atau bahkan di bawah ambang batas minimal 17 persen. Seperti keadaan yang terjadi di Kota Denpasar. Penurunan persentase distribusi pendapatan kelompok 40 persen penduduk terendah terus terjadi dalam tiga tahun terakhir. Dari kategori ketimpangan rendah di tahun 2010 dan 2011, menjadi ketimpangan sedang di tahun 2012 yaitu hanya menerima 16,21 persen kue pembangunan. Sedangkan Kabupaten Karangasem memiliki distribusi pendapatan penduduk yang paling merata dengan persentase 40 persen penduduk berpendapatan rendahnya memperoleh *share* sebesar 23,12 persen dari total pendapatan.

Perbedaan ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju saja. Hal inilah yang menjadi penyebab timbulnya ketimpangan distribusi pendapatan dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan yang semakin lebar.

Visualisasi distribusi pendapatan masing-masing kabupaten/kota pada tahun 2011, ditunjukkan oleh Kurva Lorenz pada Gambar 4.2. Sejalan dengan nilai gini ratio dan kriteria Bank Dunia, distribusi pendapatan Kabupaten Karangasem memiliki garis yang paling mendekati garis diagonal. Sedangkan garis yang paling jauh dari garis diagonal adalah garis distribusi pendapatan Kota Denpasar.

Gambar 4.2. Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali 2012



Sumber: Susenas 2012

## Kesimpulan

---

- Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Provinsi Bali pada tahun 2012 mencapai Rp. 911.724 rupiah mengalami kenaikan sebesar 19,89 persen dibandingkan tahun 2011. Kota Denpasar menempati urutan teratas dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduknya mencapai Rp. 1.361.905 rupiah dan sebaliknya Kabupaten Karangasem memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah yaitu sebesar Rp. 447.121 rupiah.
- Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di daerah perkotaan mencapai Rp. 1.073.654 rupiah sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di daerah perdesaan hanya Rp. 664.265 rupiah.
- Pada tahun 2012, secara umum tidak ada perubahan pola konsumsi penduduk Provinsi Bali. Proporsi terbesar pengeluaran penduduk digunakan untuk konsumsi non makanan yaitu mencapai 59,86 persen, sedangkan sisanya sebesar 40,14 persen digunakan untuk konsumsi makanan.
- Pada tahun 2012 nilai *gini ratio* Provinsi Bali 0,4017, dengan ketimpangan yang lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan daerah perdesaan.

# LAMPIRAN

<http://bali.bps.go.id>

**Tabel A.1. Rata-Rata Konsumsi Per Kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengeluaran, Provinsi Bali 2012**

Kabupaten/Kota	Makanan		Non Makanan		Total
	Nominal	%	Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jembrana	321170	45.75	380855	54.25	702025
Tabanan	368998	44.42	461667	55.58	830666
Badung	483372	39.89	728313	60.11	1211685
Gianyar	373502	37.24	629403	62.76	1002905
Klungkung	346795	49.89	348292	50.11	695087
Bangli	284204	50.36	280102	49.64	564306
Karangasem	245940	55.01	201181	44.99	447121
Buleleng	291180	49.05	302447	50.95	593627
Denpasar	432348	31.75	929557	68.25	1361905
<b>BALI</b>	<b>365936</b>	<b>40.14</b>	<b>545788</b>	<b>59.86</b>	<b>911724</b>
<b>2011</b>	<b>318230</b>	<b>41,85</b>	<b>442226</b>	<b>58,15</b>	<b>760456</b>

Sumber : Susenas 2012

**Tabel A.2. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Jembrana 2012**

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total
	Nominal	%	Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40% penduduk					
berpendapatan rendah	204672	62.09	124989	37.91	329662
40% penduduk					
berpendapatan menengah	324957	54.11	275614	45.89	600570
20% penduduk					
berpendapatan tinggi	545762	33.20	1097890	66.80	1643652
<b>Total</b>	<b>321170</b>	<b>45.75</b>	<b>380855</b>	<b>54.25</b>	<b>702025</b>
<b>2011</b>	<b>278835</b>	<b>42,94</b>	<b>370472</b>	<b>57,06</b>	<b>649306</b>

Sumber : Susenas 2012

**Tabel A.3. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Tabanan 2012**

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total
	Nominal	%	Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40% penduduk					
berpendapatan rendah	234807	59.46	160065	40.54	394872
40% penduduk					
berpendapatan menengah	399440	51.39	377857	48.61	777297
20% penduduk					
berpendapatan tinggi	575525	31.95	1225563	68.05	1801087
<b>Total</b>	<b>368998</b>	<b>44.42</b>	<b>461667</b>	<b>55.58</b>	<b>830666</b>
<b>2011</b>	<b>325216</b>	<b>43,06</b>	<b>429965</b>	<b>56,94</b>	<b>755181</b>

Sumber : Susenas 2012

**Tabel A.4. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Badung 2012**

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total
	Nominal	%	Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40% penduduk berpendapatan rendah	303050	50.57	296171	49.43	599221
40% penduduk berpendapatan menengah	525266	44.30	660307	55.70	1185573
20% penduduk berpendapatan tinggi	759206	30.55	1725978	69.45	2485184
<b>Total</b>	<b>483372</b>	<b>39.89</b>	<b>728313</b>	<b>60.11</b>	<b>1211685</b>
<b>2011</b>	<b>399450</b>	<b>39,29</b>	<b>617273</b>	<b>60,71</b>	<b>1016723</b>

Sumber : Susenas 2012

**Tabel A.5. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Gianyar 2012**

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total
	Nominal	%	Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40% penduduk					
berpendapatan rendah	247829	50.23	245552	49.77	493381
40% penduduk					
berpendapatan menengah	388916	41.28	553179	58.72	942096
20% penduduk					
berpendapatan tinggi	584025	28.16	1490070	71.84	2074095
<b>Total</b>	<b>373502</b>	<b>37.24</b>	<b>629403</b>	<b>62.76</b>	<b>1002905</b>
<b>2011</b>	<b>287190</b>	<b>44,51</b>	<b>357978</b>	<b>55,49</b>	<b>645168</b>

Sumber : Susenas 2012

**Tabel A.6. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Klungkung 2012**

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total
	Nominal	%	Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40% penduduk					
berpendapatan rendah	213608	64.48	117683	35.52	331291
40% penduduk					
berpendapatan menengah	358988	55.11	292422	44.89	651409
20% penduduk					
berpendapatan tinggi	588976	38.99	921652	61.01	1510628
<b>Total</b>	<b>346795</b>	<b>49.89</b>	<b>348292</b>	<b>50.11</b>	<b>695087</b>
<b>2011</b>	<b>302605</b>	<b>45,20</b>	<b>366917</b>	<b>54,80</b>	<b>669522</b>

Sumber : Susenas 2012

**Tabel A.7. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Bangli 2012**

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total
	Nominal	%	Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40% penduduk					
berpendapatan rendah	195806	64.34	108520	35.66	304326
40% penduduk					
berpendapatan menengah	288260	54.12	244393	45.88	532653
20% penduduk					
berpendapatan tinggi	453060	39.47	694833	60.53	1147894
<b>Total</b>	<b>284204</b>	<b>50.36</b>	<b>280102</b>	<b>49.64</b>	<b>564306</b>
<b>2011</b>	<b>247048</b>	<b>53,47</b>	<b>215025</b>	<b>46,53</b>	<b>462073</b>

Sumber : Susenas 2011

**Tabel A.8. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Karangasem 2012**

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total
	Nominal	%	Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40% penduduk					
berpendapatan rendah	163382	63.72	93036	36.28	256418
40% penduduk					
berpendapatan menengah	245476	59.01	170528	40.99	416004
20% penduduk					
berpendapatan tinggi	413586	46.25	480569	53.75	894155
<b>Total</b>	<b>245940</b>	<b>55.01</b>	<b>201181</b>	<b>44.99</b>	<b>447121</b>
<b>2011</b>	<b>247701</b>	<b>54,09</b>	<b>210207</b>	<b>45,91</b>	<b>457908</b>

Sumber : Susenas 2012

**Tabel A.9. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kabupaten Buleleng 2012**

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total
	Nominal	%	Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40% penduduk					
berpendapatan rendah	186213	61.95	114369	38.05	300582
40% penduduk					
berpendapatan menengah	296386	54.25	249944	45.75	546330
20% penduduk					
berpendapatan tinggi	491053	38.51	784225	61.49	1275278
<b>Total</b>	<b>291180</b>	<b>49.05</b>	<b>302447</b>	<b>50.95</b>	<b>593627</b>
<b>2011</b>	<b>266381</b>	<b>48,13</b>	<b>287075</b>	<b>51,87</b>	<b>553456</b>

Sumber : Susenas 2012

**Tabel A.10. Rata-Rata Konsumsi Per kapita Per Bulan Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran, Kota Denpasar 2012**

Kelompok Pendapatan Penduduk	Makanan		Non Makanan		Total
	Nominal	%	Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40% penduduk					
berpendapatan rendah	280775	51.30	266508	48.70	547283
40% penduduk					
berpendapatan menengah	466165	41.42	659287	58.58	1125452
20% penduduk					
berpendapatan tinggi	668871	19.25	2806165	80.75	3475036
<b>Total</b>	<b>432348</b>	<b>31.75</b>	<b>929557</b>	<b>68.25</b>	<b>1361905</b>
<b>2011</b>	<b>389421</b>	<b>35,10</b>	<b>720017</b>	<b>64,90</b>	<b>1109439</b>

Sumber : Susenas 2012

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik Provinsi Bali**  
*Jl. Raya Puputan No. 1 Renon Denpasar 80226*  
*Telp. (0361) 238159, Fax. (0361) 238162*  
*Homepage: <http://bali.bps.go.id>*  
*E-mail: [bps5100@bps.go.id](mailto:bps5100@bps.go.id)*